

BAB II

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Semarang di daerah barat, Kabupaten Kudus di bagian utara, Kabupaten Blora di bagian Timur, Sragen dan Boyolali di sebelah selatan. Luas wilayah sekitar 2.022,25 km², memiliki 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan, dengan jumlah penduduk 1.501.145 orang terdiri atas 754.396 laki-laki dan 746.749 perempuan. (Dispendukcapil Grobogan, 2022). Kabupaten Grobogan terletak di dataran rendah, dengan mayoritas penduduk pada 2022 berada dalam kategori usia kerja (1.801.423 orang) Berdasarkan data BPS 2023, tingkat kemiskinan mencapai 162.520 ribu jiwa, sehingga Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah penerima manfaat terbesar di provinsi Jateng. (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023). Salah satu kecamatan penerima manfaat terbesar di Kabupaten Grobogan adalah kecamatan Purwodadi. Purwodadi merupakan ibukota Grobogan, berada di pusat kabupaten Grobogan ternyata tidak serta merta membuat Purwodadi terlepas dari tingkat kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan di kecamatan Purwodadi.

Tingkat kemiskinan dipengaruhi beberapa faktor seperti: (1) pengangguran; (2) jumlah penduduk; (3) angka melek huruf; dan (4) lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga terkait

pentingnya pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kondisi geografis dan demografis membawa pengaruh yang kompleks terhadap permasalahan sosial dan perekonomian masyarakat (Triningsih, 2013:66). Perkembangan jumlah penduduk yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi Covid 19, tahun 2020-2022, dimana banyak sekali sektor perekonomian yang rontok, hilangnya lapangan pekerjaan, yang membuat angka kemiskinan semakin parah. Untuk mengurangi ketimpangan kehidupan tersebut, pemerintah membuat berbagai upaya/langkah yang diterapkan untuk masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan kebijakan bantuan sosial sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Pada faktanya bantuan sosial tidak serta merta dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil manfaat kebijakan tersebut. Justru muncul masalah baru yakni tingkat ketergantungan masyarakat dalam kebijakan sementara tersebut. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan bantuan sosial dengan berkala merupakan upaya yang dapat dilakukan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat sehingga menjadi kebijakan yang berkelanjutan.

2.1 Pendampingan *Family Development Session* dalam Program Keluarga Harapan Masyarakat Kabupaten Grobogan

Setiap tahun pelaksanaan Program Keluarga Harapan mengalami perubahan baik dari jumlah penerima bantuan maupun muatan lokal. Muatan lokal disusun secara sistematis dan teratur melalui kegiatan *Family Development Session* (FDS). FDS adalah kegiatan pembelajaran secara informal dengan mengikutsertakan fasilitator dan keluarga penerima manfaat sebagai upaya meningkatkan kesadaran, perubahan perilaku hingga terjadi graduasi mandiri oleh keluarga penerima manfaat.

Kegiatan FDS berada dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang diawasi langsung oleh Koordinator Kecamatan serta pendamping lainnya. Pendamping PKH, FDS dan KPM menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan FDS merupakan rangkaian kegiatan yang wajib diikuti oleh KPM. Pendampingan FDS bertujuan untuk mengubah pola pikir tentang KPM agar penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial sementara, namun dididik menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan terutama dalam mengatasi krisis perekonomian keluarga. Pendampingan adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan pengarahan berupa pengetahuan dan pengalaman kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan

pendampingan FDS di Kabupaten Grobogan diimplementasikan menjadi beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Pembentukan kelompok kecil yang dilakukan oleh pendamping PKH berdasarkan jarak lokasi rumah KPM yang terdiri dari 15-20 orang. Gabungan KPM dalam kelompok kecil itu memiliki satu orang untuk dijadikan ketua kelompok. Ketua kelompok membantu pendamping PKH untuk mendiskusikan waktu dan tempat pelaksanaan FDS tiap bulannya. Selain itu ketua kelompok juga memudahkan dalam penyebaran informasi terbaru terkait pelaksanaan FDS sehingga tingkat partisipasi KPM meningkat tiap pertemuannya.
2. Sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH pada setiap pertemuan, di mana pendamping PKH menjelaskan dengan rinci terkait kewajiban KPM menghadiri FDS. Selain itu juga menjelaskan manfaat dan tujuan dari kegiatan FDS sehingga mempengaruhi pola pikir khususnya dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak; pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha; kesehatan dan gizi; dan perlindungan anak.
3. Klasifikasi kebutuhan KPM berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang sedang

dihadapi KPM sehingga dapat dilakukan diskusi atau sharing session untuk menemukan solusinya.

4. Analisis hasil identifikasi kebutuhan KPM, di mana menjadi pedoman bagi pendamping PKH dalam mentransformasikan materi pada kegiatan FDS. Kondisi sosial yang terjadi di Kabupaten Grobogan adalah rendahnya pengetahuan masyarakat setempat terkait pentingnya mengikutsertakan anak dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun ataupun acuh untuk mengakses layanan kesehatan.
5. Pelaksanaan FDS didasarkan pada panduan pelaksanaan dan modul yang telah dirancang secara sistematis. Kegiatan ini dilakukan oleh satu orang pendamping dengan jumlah peserta maksimal 40 orang dan bertugas memotivasi KPM untuk selalu ikut serta secara aktif sehingga terjadi diskusi yang maksimal antar KPM.
6. Rencana pelaksanaan FDS bulan berikutnya dilakukan oleh pendamping PKH sebagai format laporan bulanan yang diserahkan oleh Koordinator Kabupaten. Laporan tersebut digunakan sebagai penilaian kinerja dari pendamping PKH.
7. Evaluasi FDS dilaksanakan secara berjenjang oleh pendamping PKH berupa laporan jumlah KPM, notulensi kegiatan dan foto kegiatan.

Pendampingan FDS adalah proses belajar yang membutuhkan waktu relatif panjang, di mana terdapat proses berdasarkan pengalaman sebelumnya dan diolah lagi menjadi lebih baik. Pendampingan FDS dilaksanakan secara partisipatif yang didorong oleh suasana belajar yang mendukung sehingga KPM dapat berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Kegiatan FDS tidak hanya berupa metode searah tetapi pendamping juga menerapkan sistem diskusi atau tanya jawab sehingga proses belajar lebih menyenangkan dan partisipatif.

Keberhasilan pendamping FDS tidak diukur dari banyaknya informasi yang disampaikan tetapi seberapa jauh proses belajar bersama yang komunikatif dapat memberikan kesadaran sikap, pengetahuan dan keterampilan baru bagi kelompok KPM dampungannya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Pelaksanaan FDS idealnya menggunakan pendekatan andragogi, di mana pendekatan proses belajar yang menggunakan prinsip orang dewasa dengan memberikan pengalaman kepada KPM dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tujuan awal FDS. Latar belakang pendidikan pendamping yang berbeda juga berpengaruh pada proses belajar dan model penyampaian materi. Tidak semua pendamping menerapkan gaya andragogi, beberapa pendamping hanya melaksanakan tugasnya untuk menjelaskan informasi berdasarkan panduan tanpa

memperhatikan perwujudan tujuan FDS yakni perubahan pola pikir hingga kemandirian KPM. Selain itu rata-rata penerima manfaat berpendidikan rendah sehingga masih menerapkan *mindset* bahwa mengikuti FDS adalah kewajiban peserta FDS sebagai syarat mendapatkan bantuan PKH. Perbedaan persepsi pada KPM juga menyebabkan mereka sendiri kesulitan mengerti dengan baik maksud dan tujuan dari program kesejahteraan sosial seperti PKH.

Kendala yang dialami oleh pendamping PKH maupun peserta adalah menetapkan tanggal berdasarkan kesepakatan bersama, akan tetapi hal tersebut dapat terselesaikan dengan membuat grup chat whatsapp sehingga koordinasi dan komunikasi lebih mudah dilakukan. Pendampingan FDS dinilai efektif apabila KPM terlibat secara aktif dan partisipatif dalam diskusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dialami. Selain itu beban jumlah KPM yang cukup banyak, diluar tugas utama mendampingi KPM tugas seperti kegiatan pemutakhiran data meliputi verifikasi pendidikan dan kesehatan serta kegiatan komplementaritas yakni melakukan pencairan BPNT (Bantuan Program Non Tunai) menjadi hambatan pendamping dalam melaksanakan FDS dengan maksimal. Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya mengintervensi secara komprehensif dalam aspek pangan dan non pangan sebagai tolak ukur kemiskinan. Komponen lain seperti papan dan sandang masih belum terealisasi

dengan baik. Secara fakta banyak penerima manfaat yang mendapatkan bantuan PKH dan bantuan lainnya secara bersamaan.

Semakin lama KPM menerima bantuan PKH tentunya semakin lama juga mengikuti kegiatan FDS. Harapannya dengan semakin lamanya KPM mengikuti kegiatan FDS, maka pengetahuan yang dimiliki juga semakin berkembang. Harapannya dengan semakin berkembangnya kemampuan KPM mampu memberikan perubahan kearah positif khususnya pada keluarga dan berdampak bagi masyarakat luas. Kesuksesan FDS tidak hanya menguntungkan bagi pendamping PKH saja tetapi juga bermanfaat bagi penerima manfaat, mereka dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan untuk memakmurkan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan pengalaman baru yang didapatkan dari proses tukar pikiran dalam forum FDS menjadi hal yang penting agar angka kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam elemen masyarakat tidak meningkat.

2.2 Penggunaan Media dalam Kegiatan FDS PKH pada Keluarga Penerima Manfaat Kabupaten Grobogan

Kesuksesan pelaksanaan FDS tidak terlepas dari penggunaan alat bantu media. Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi dalam penggunaan berbagai jenis media seperti modul, *flipchart*, poster maupun video animasi. Materi yang disajikan dalam media tersebut adalah standar informasi yang dijadikan pendamping sebagai bahan untuk diskusi FDS.

Pendamping PKH berharap dengan menggunakan media sebagai alat bantu membuat kegiatan FDS menjadi lebih efektif. Proses kegiatan FDS dapat terlaksana dengan baik apabila pendamping PKH memilih media yang cocok dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan sehingga secara tidak langsung dapat menarik minat penerima manfaat dalam diskusi partisipatif. Konten yang disajikan dalam media tersebut tidak hanya berupa pengetahuan teoritis saja, tetapi juga didukung dengan melakukan praktek. Setiap media mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Diskusi FDS tidak hanya berupa metode ceramah tetapi dalam proses belajarnya lebih menekankan pada keterampilan proses dan aktif learning, keterlibatan secara fisik maupun psikis dapat memudahkan penerima manfaat dalam memahami informasi dan mengurangi kesalahan persepsi transformasi pesan.

Pengaruh penggunaan media dalam proses diskusi FDS memudahkan pendamping PKH dan peserta FDS, sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan semangat penerima manfaat, dikarenakan penggunaan huruf atau gambar dalam media lebih menarik perhatian. Implementasi pengetahuan melalui visualisasi gambar atau teks lebih dipahami penerima manfaat dan memungkinkan peserta menguasai tujuan dari pelaksanaan FDS PKH. Media lebih bervariasi tidak hanya berupa komunikasi verbal

dengan menyampaikan kata lisan saja, serta penerima manfaat juga tidak mudah bosan dalam mengikuti diskusi.

Media yang digunakan dalam kegiatan FDS ada tiga jenis yakni modul, *flipchart* dan video animasi. Modul termasuk salah satu media yang wajib dipakai oleh pendamping PKH, transformasi pesan yang dilakukan oleh pendamping PKH berlandaskan informasi yang tercantum dalam modul. Modul adalah sebuah bahan cetak yang ditulis lengkap dan sistematis untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran secara personal. Modul dapat meningkatkan partisipasi penerima manfaat dalam diskusi dan lebih banyak memberikan kontribusi untuk terlibat secara aktif. Adanya modul penerima manfaat dapat menerima feedback sangat baik dan pendamping PKH pun juga dapat mengetahui hasil diskusi dalam FDS setelah dilakukan evaluasi laporan. Jenis modul yang digunakan dalam FDS terbagi menjadi tiga yakni:

1. Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak, yang menekankan pemahaman pada KPM bahwa rendahnya pendapatan orang tua tidak berarti anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan peran orangtua dalam mendampingi tumbuh kembang anak sehingga secara tidak langsung memotivasi anak untuk giat dan sukses.
2. Modul Kesehatan dan Gizi, menekankan pada pemahaman KPM untuk meningkatkan intensitas pemeriksaan kesehatan,

meningkatkan pengetahuan kepada KPM terkait pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak sehingga tidak terjadi peningkatan gizi buruk (*stunting*).

3. Modul Perencanaan Keuangan dan Perencanaan Usaha, mengembangkan pengetahuan KPM untuk dapat mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan skala prioritas, mengasah keterampilan dan perencanaan usaha sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga.

Media kedua yang digunakan adalah *flipchart*, alat bantu berupa lembaran kertas yang berbentuk seperti kalender dengan ukuran yang besar yang dilengkapi visualisasi gambar, huruf, diagram dan angka. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pendamping PKH di Kecamatan Purwodadi bahwa mayoritas penerima manfaat cenderung diam dan pasif tanpa adanya umpan balik. Meskipun diskusi sudah dilakukan dalam kelompok kecil peserta hanya terpaku pada proses diskusi yang berpusat pada pendamping PKH. Media lain seperti modul sebenarnya cukup menjelaskan informasi secara rinci tetapi kecenderungan penerima manfaat enggan membaca secara mandiri. *Flipchart* dirasa alternatif pilihan yang cocok untuk menunjang kesuksesan FDS. Media ini ukurannya lebih besar daripada media modul, tiap lembar *flipchart* berisi tentang penjelasan singkat dari rincian yang tertuang dalam modul. Visualisasi dengan warna yang menarik dan mencolok

menjadikan penerima manfaat bersemangat dalam mengikuti proses diskusi FDS. Pembuatan *flipchart* juga mudah, selain itu media ini praktis untuk dibawa kemana-mana. Penjelasan materi dalam *flipchart* dikemas dengan praktis, kreatif dan inovatif. Hal tersebut penting untuk menunjang proses FDS, di mana pokok sajian informasi yang disajikan dapat memudahkan fokus perhatian penerima manfaat dan membimbing alur diskusi secara perlahan.

Alternatif pilihan media terakhir yang digunakan dalam FDS adalah video animasi. Video animasi adalah perpaduan dari media video dan media animasi melalui visualisasi terkait ilustrasi kejadian yang tidak dapat dilihat secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Video animasi dapat berupa orang, hewan dan objek 2D maupun 3D. Sebenarnya video animasi adalah gambar diam yang diproyeksikan bergerak secara bergantian sehingga seolah-olah terlihat hidup. Video animasi tergolong mudah untuk dicari, beberapa channel resmi maupun tidak resmi dalam platform Youtube sudah menyediakan berbagai jenis video animasi implementasi pelaksanaan FDS dalam dunia nyata. Video animasi lebih mudah menarik perhatian penerima manfaat, selain itu juga menciptakan suasana diskusi yang lebih menyenangkan. Pendamping PKH wajib menggunakan bahan ajar berupa buku modul, buku pintar, *flipchart*, poster, peralatan audio visual (optional). Penayangan video animasi tidak selalu digunakan

pendamping dalam setiap pertemuannya, hanya beberapa kali saja. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yakni keterbatasan jumlah proyektor dan daya listrik tuan rumah yang tidak mencukupi. Selain menarik perhatian penerima manfaat, video animasi juga dapat menjadi boomerang dalam kelangsungan diskusi FDS apabila digunakan tidak tepat dapat mengalihkan perhatian penerima manfaat dari isi materi yang disampaikan pendamping PKH. Dengan demikian penggunaan video animasi harus diefektifkan dan mengolah media tersebut sehingga peserta FDS dapat lebih fokus pada isi materi daripada animasinya.

Kondisi diskusi dalam kegiatan FDS pada penerima manfaat Kecamatan Purwodadi cenderung kurang partisipatif. Selain memberikan pengetahuan, pendamping PKH juga dituntut untuk mengembangkan dan membekali penerima manfaat dengan berbagai keterampilan sebagai upaya mensukseskan tujuan PKH sehingga tercipta perubahan perilaku pada KPM. Sejalan dengan tujuan tersebut, penggunaan alat bantu media diharapkan dapat membentuk penerima manfaat sebagai peserta FDS lebih berpartisipasi dan berperan aktif, di mana hal tersebut dapat memberikan penerima manfaat untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mengimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2.3 Tingkat Partisipasi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Grobogan

Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam provinsi dengan catatan kemiskinan tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, tercatat per Maret 2023 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berada diatas rata-rata nasional yakni 9,36%. Hal tersebut dipengaruhi oleh sektor ketenagakerjaan, mayoritas penduduk Jawa Tengah bekerja dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan persentase sebesar 25%, di mana rata-rata pendapatannya lebih rendah dibandingkan sektor lain. Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten dengan tingkat ketimpangan perekonomian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022 tercatat penerima rumah tangga sebagai penerima manfaat sebanyak 92,18% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022). Penyebab kemiskinan ekstrem di Kabupaten Grobogan dikarenakan dampak pandemi 2020-2022 yang ditindaklanjuti dari surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 414.2/320/2022 terkait Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Grobogan. (Suara Merdeka, 2023).

Diketahui sampai 2022, persentase peningkatan graduasi keluarga tidak mencapai target awal yakni 30% hanya tercapai sebesar 25%. Data keluarga penerima manfaat tiap tahunnya hampir sama tidak ada perbedaan secara signifikan, hal tersebut terjadi

dikarenakan mereka tidak mau terlepas dari bantuan sosial tersebut dan enggan berusaha lebih keras untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Berdasarkan wawancara dari salah satu pendamping PKH di Kecamatan Purwodadi, berdasarkan pengalamannya dalam satu tahun hanya 1-2 penerima manfaat yang mengalami graduasi mandiri. Tidak semua pendamping PKH dapat mencapai target graduasi sejahtera yang ditetapkan oleh Dinas Sosial selaku penanggung jawab utama, mereka menargetkan 1-5 penerima manfaat tiap tahunnya.

Melihat letak geografisnya, kabupaten ini merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.488.947 juta jiwa, komposisi penduduk juga mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Idealnya semakin banyak penduduk dengan usia produktif yakni penduduk usia 15 tahun atau lebih maka semakin besar pula sumber daya manusia yang terserap dalam lapangan pekerjaan. Pada 2022 Kabupaten Grobogan memiliki 1.081.423 orang usia kerja dengan uraian data (Sakernas, 2022), sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Kelompok Umur			Total
	15 – 24	25 – 54	55+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ SD/Sederajat	10,00	50,15	90,90	54,46
SMP/Sederajat	29,47	25,64	4,27	21,04
≥ SMA/Sederajat	60,53	24,21	4,83	24,50
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 1. 2 Grafik Angkatan Kerja Kabupaten Grobogan 2022

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan 2022

Data di atas menunjukkan mayoritas penduduk di Kabupaten Grobogan adalah usia produktif untuk bekerja. Proporsi penduduk usia produktif pada perempuan lebih besar daripada laki-laki, tetapi berdasarkan data Sakernas 2022 laki-laki lebih banyak bekerja dibandingkan perempuan dengan persentase sebesar 59,78%. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang mereka lakukan, dengan lulusan seperti itu masyarakat tidak mudah memiliki pekerjaan yang lebih tinggi sehingga lebih memilih untuk bekerja dalam sektor pertanian, di mana hasil pendapatan yang diperoleh lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Kabupaten Grobogan memilih bergantung pada bantuan Program Keluarga Harapan dikarenakan pendapatan yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan maksimal.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Grobogan kemiskinan pada 2023 mencapai 162.250 orang, berdampak pada kondisi pendidikan di Kabupaten Grobogan. Terdapat 1.911 anak yang putus sekolah dan 29.310 suspek anak putus sekolah dikarenakan faktor perekonomian keluarga, mereka lebih

memilih bekerja untuk membantu pendapatan keluarganya. Berdasarkan data Susenas 2019 Kabupaten Grobogan menduduki peringkat kedua anak putus sekolah (ATS) se-Jawa Tengah, usai dibujuk dan ditawarkan fasilitas pendidikan yang memadai hanya 43 anak yang bersedia bersekolah kembali, sisanya memilih bekerja sebagai kuli bangunan. Hal itu berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dalam mengambil keputusan, ditambah adanya mendapatkan intervensi lain, satu keluarga dapat memperoleh lebih dari satu bantuan komplementer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Grobogan. Mayoritas pekerja usia produktif adalah tamatan pendidikan sekolah dasar sebesar 50,15% sehingga mereka tidak dapat memilih pekerjaan dengan pendapatan yang lebih besar dikarenakan tidak memenuhi syarat kualifikasi dan memilih bekerja di sektor pertanian. Banyaknya intervensi justru tidak membuat kemiskinan habis tak bersisa, tetapi menimbulkan efek lain yakni ketergantungan masyarakat.

Campur tangan pemerintah disambut dengan baik oleh masyarakat dari segi bantuan finansial, akan tetapi keterlibatan secara fisik maupun pikiran tidak dilakukan oleh masyarakat. Antusias masyarakat terutama penerima manfaat PKH di Kabupaten Grobogan dapat dikategorikan rendah, mereka terpaksa berkontribusi dalam FDS sehingga transformasi pesan oleh pendamping PKH tidak dapat terserap dengan maksimal. Perwakilan KPM adalah ibu rumah tangga, mayoritas menyepelekan rangkaian kegiatan diskusi FDS. Dari wawancara beberapa pendamping

PKH selama mereka bekerja lebih dari dua tahun, hanya beberapa peserta PKH yang tertarik dan serius menyimak materi, sisanya hanya sebatas formalitas saja.

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Purwodadi telah berjalan secara baik tetapi belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan, hal tersebut disebabkan oleh partisipasi KPM yang rendah dan belum sepenuhnya dalam menanamkan kesadaran untuk mengembangkan diri terbebas dari lingkaran kemiskinan. Ketidakhadiran KPM dikarenakan kesalahan pola pikir KPM, di mana bergantung dengan intervensi bantuan pemerintah dan tidak mengedepankan keberlanjutan dari adanya FDS PKH. Bekerja juga menjadi alasan klasik KPM untuk malas hadir dalam FDS. Peningkatan kehadiran penerima manfaat dalam FDS terjadi saat momen penyaluran bantuan, mereka berbondong-bondong dengan penuh cinta untuk menagih mana bantuan untuk keluarganya. Peningkatan kemampuan KPM Kecamatan Purwodadi telah dipenuhi tetapi kurang optimal dalam berkontribusi dalam FDS, padahal rangkaian kegiatan FDS sangat penting dalam menentukan tercapainya tujuan FDS secara substantif dalam menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan pemahaman serta kesadaran KPM terkait pentingnya PKH. Serta tidak membuat mereka hanya menunggu bantuan tetapi memikirkan dan menetapkan langkah untuk meningkatkan kualitas hidupnya.